



Pengelolaan Sumber Daya Manusia dalam Implementasi Program Makanan Bergizi Gratis

(Studi Kualitatif pada SPPG di Bone Bolango)

Sri Yulianti Mozin¹, Romy Tantu², Tiara Primasari A Olli³, Ria Khairunnisa J Kaharu⁴, Sandra Van Gobel⁵

Program Studi Administrasi Publik, Univeritas Negeri Gorontalo, Indonesia¹⁻⁵

Email Korespondensi: tiaraprimasari050@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 18 Mei 2026

ABSTRACT

This study examines the role of human resource management in the implementation of the Free Nutritious Meal Program (MBG) at the Nutritional Fulfillment Service Unit (SPPG) in Bone Bolango Regency. The program is part of a national strategic policy aimed at improving nutritional status and human resource quality. This research aims to analyze how human resource management influences the effectiveness of program implementation at the operational level. This study employs a qualitative approach with a case study design. Data were collected through direct observation and document analysis, including official guidelines such as the MBG implementation manual and technical guidelines issued by the National Nutrition Agency. Data were analyzed using an interactive model involving data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results indicate that although the program is supported by clear technical guidelines, its implementation at the local level is not yet optimal. Several issues were identified, including overlapping roles among implementers, informal coordination, weak supervision, limited technical competence, and inadequate supporting facilities. These conditions reflect a gap between regulatory standards and actual practices in the field. The study concludes that effective human resource management is a key factor in ensuring successful program implementation. Strengthening capacity, improving coordination mechanisms, and enhancing supervision are necessary to align implementation practices with established technical standards.

Keywords: Human Resource Management, Public Policy Implementation, Free Nutritious Meal Program, SPPG, Bone Bolango.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pengelolaan sumber daya manusia dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Bone Bolango. Program ini merupakan kebijakan strategis nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi serta pembangunan sumber daya manusia. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana pengelolaan sumber daya manusia mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program di tingkat operasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Data diperoleh melalui observasi langsung serta analisis dokumen resmi, seperti Pedoman Makan Bergizi Gratis di Satuan Pendidikan dan Petunjuk Teknis Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG yang diterbitkan oleh Badan Gizi Nasional. Analisis data dilakukan dengan model interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun program telah memiliki pedoman teknis yang jelas,

pelaksanaannya di tingkat daerah belum sepenuhnya optimal. Ditemukan berbagai permasalahan, seperti tumpang tindih pembagian tugas, koordinasi yang belum terstruktur, pengawasan yang belum optimal, keterbatasan kompetensi pelaksana, serta sarana pendukung yang belum memadai. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara standar yang ditetapkan dengan praktik di lapangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan sumber daya manusia menjadi faktor kunci dalam keberhasilan implementasi program, sehingga diperlukan penguatan kapasitas, perbaikan koordinasi, serta peningkatan fungsi pengawasan agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif.

Kata Kunci: *Pengelolaan SDM, Implementasi Kebijakan, Program MBG, SPPG, Bone Bolango.*

PENDAHULUAN

Pembangunan sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu agenda utama dalam meningkatkan daya saing bangsa, terutama pada era global yang ditandai dengan persaingan kompetensi yang semakin ketat. Kualitas SDM sangat dipengaruhi oleh kondisi kesehatan dan pemenuhan gizi sejak usia dini, karena asupan nutrisi yang memadai berperan penting dalam mendukung perkembangan kognitif, produktivitas, serta kesiapan individu dalam menghadapi tantangan pembangunan (Sarjito, 2024; Ciplis et al., 2021).

Meski demikian, permasalahan gizi di Indonesia masih menunjukkan kondisi yang memerlukan perhatian serius. Tingginya angka stunting, ketimpangan akses terhadap pangan bergizi, serta perbedaan kualitas layanan kesehatan antar wilayah menjadi indikasi bahwa upaya intervensi belum sepenuhnya optimal. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan individu, tetapi juga berpengaruh terhadap kualitas pembangunan nasional dalam jangka panjang, termasuk produktivitas tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi (Basit & Ramadani, 2025; Lendra et al., 2025).

Pemerintah kemudian menghadirkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu kebijakan strategis untuk menjawab persoalan tersebut. Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas gizi peserta didik sekaligus memperkuat pembangunan SDM secara berkelanjutan. Selain berfungsi sebagai intervensi kesehatan, program ini juga dipandang sebagai investasi jangka panjang yang berpotensi memberikan dampak luas terhadap kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat (Basuki et al., 2026; Risnawati et al., 2025).

Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di berbagai daerah menunjukkan dinamika yang beragam. Beberapa penelitian mengungkap bahwa program ini telah berjalan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, namun masih dihadapkan pada berbagai kendala, seperti keterbatasan sarana, distribusi yang belum merata, serta koordinasi antar pelaksana yang belum optimal (Silaban et al., 2026; Winny et al., 2025).

Sejumlah studi juga menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh kebijakan yang dirancang, tetapi sangat dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia sebagai pelaksana di lapangan. Ketersediaan tenaga, kejelasan pembagian tugas, serta kemampuan koordinasi menjadi faktor penting yang menentukan kelancaran program. Ketika aspek tersebut belum berjalan

dengan baik, pelaksanaan program cenderung menghadapi hambatan operasional yang berulang (Hanasi et al., 2026).

Pada tingkat operasional, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memiliki peran penting dalam memastikan program berjalan sesuai tujuan. Unit ini bertanggung jawab terhadap penyediaan, pengolahan, hingga distribusi makanan kepada penerima manfaat. Aktivitas tersebut menuntut pengelolaan sumber daya manusia yang terstruktur, mulai dari perencanaan tenaga kerja hingga pengawasan pelaksanaan tugas. Ketidaktepatan dalam pengelolaan SDM berpotensi mempengaruhi kualitas layanan dan efektivitas program secara keseluruhan (Basuki et al., 2026).

Pengelolaan sumber daya manusia dalam sektor publik pada dasarnya mencakup proses perencanaan, pengorganisasian, pengembangan, serta pengawasan tenaga kerja untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif. Pengelolaan SDM yang baik tidak hanya berkaitan dengan jumlah tenaga yang tersedia, tetapi juga menyangkut kompetensi, pembagian tugas, serta kemampuan koordinasi antar pelaksana. Dalam berbagai studi administrasi publik, kualitas pengelolaan SDM seringkali menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan, terutama pada program yang bersifat operasional dan melibatkan banyak aktor di tingkat lapangan (Winnie et al., 2025; Hanasi et al., 2026).

Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis mengacu pada dokumen resmi pemerintah, salah satunya Pedoman Makan Bergizi Gratis (MBG) di Satuan Pendidikan yang disusun oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dokumen ini menjelaskan bahwa program MBG dirancang sebagai langkah sistematis dalam pemenuhan gizi peserta didik melalui mekanisme yang terstruktur, mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, hingga evaluasi program (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, 2024)

Selain itu, Badan Gizi Nasional menetapkan Petunjuk Teknis Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2026 melalui Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Nomor 401.1 Tahun 2025 sebagai acuan utama dalam pelaksanaan program. Dokumen ini menekankan pentingnya tata kelola yang efektif, termasuk pembagian peran, koordinasi, serta mekanisme pengawasan dalam mendukung keberhasilan implementasi program di tingkat pelaksana (Badan Gizi Nasional, 2025).

Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Bone Bolango menunjukkan kondisi yang belum sepenuhnya stabil. Meskipun program ini mendapat antusiasme dari masyarakat, implementasinya masih berada pada tahap penyesuaian dan persiapan teknis. Pemerintah daerah masih melakukan berbagai upaya koordinasi serta penyiapan sarana pendukung, termasuk kesiapan SPPG sebagai pelaksana utama program di lapangan. Situasi ini memperlihatkan adanya perbedaan antara harapan masyarakat dengan kesiapan implementasi program yang masih terus dibangun.

Pada tahap awal pelaksanaan, sejumlah aspek teknis menjadi perhatian, seperti kesiapan ruang transit makanan, mekanisme distribusi, serta pengendalian kualitas pangan sebelum disalurkan kepada peserta didik. Selain itu, masih ditemukan persoalan terkait standar operasional, termasuk pengelolaan limbah

dapur yang belum sepenuhnya memenuhi ketentuan yang berlaku. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program memerlukan pengelolaan yang lebih terarah, terutama pada aspek operasional yang bersentuhan langsung dengan layanan kepada masyarakat.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa tantangan utama dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya terletak pada aspek kebijakan, tetapi juga pada kualitas pengelolaan sumber daya manusia sebagai pelaksana di tingkat lapangan. Kemampuan dalam mengelola tenaga kerja, memastikan kepatuhan terhadap standar operasional, serta menjaga kualitas layanan menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan program secara keseluruhan.

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat adanya kesenjangan antara tujuan program dengan pelaksanaan di lapangan, khususnya pada aspek pengelolaan sumber daya manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pengelolaan sumber daya manusia dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Bone Bolango, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program serta menjadi dasar rekomendasi perbaikan kebijakan di masa mendatang.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus yang berfokus pada pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kabupaten Bone Bolango. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai pengelolaan sumber daya manusia dalam implementasi program melalui pengamatan langsung terhadap praktik di lapangan serta analisis terhadap berbagai dokumen yang relevan. Lokasi penelitian berada di Kabupaten Bone Bolango dengan fokus pada SPPG sebagai unit pelaksana program MBG. Penelitian ini tidak mencantumkan identitas spesifik lokasi operasional secara rinci untuk menjaga etika penelitian dan menghindari potensi dampak negatif terhadap pihak yang terlibat. Peneliti berperan sebagai instrumen utama yang melakukan pengamatan langsung terhadap aktivitas operasional, termasuk proses pengolahan makanan, distribusi, serta pengelolaan kerja antar pelaksana di lingkungan SPPG. Kehadiran peneliti di lapangan dilakukan secara terbatas dan tidak mengintervensi jalannya kegiatan, sehingga data yang diperoleh merepresentasikan kondisi aktual pelaksanaan program. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung terhadap pelaksanaan program MBG, terutama yang berkaitan dengan pembagian tugas, koordinasi kerja, serta mekanisme pengawasan di tingkat pelaksana. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen, seperti pedoman pelaksanaan program, laporan kegiatan, berita resmi, serta publikasi ilmiah yang relevan dengan implementasi MBG dan pengelolaan sumber daya manusia dalam sektor publik.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan studi dokumentasi. Observasi digunakan untuk mengidentifikasi pola kerja, interaksi

antar pelaksana, serta kendala yang muncul selama pelaksanaan program. Sementara itu, studi dokumentasi digunakan untuk menelaah kesesuaian antara standar operasional yang ditetapkan dengan praktik di lapangan. Penggunaan kedua teknik ini dilakukan secara bersamaan untuk memperoleh data yang saling melengkapi dan memperkuat hasil analisis. Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti melakukan seleksi dan penyederhanaan data yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif untuk memudahkan pemahaman terhadap pola-pola yang ditemukan. Tahap akhir dilakukan dengan menarik kesimpulan berdasarkan keterkaitan antar temuan yang diperoleh selama proses penelitian. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan data hasil observasi dengan informasi yang diperoleh dari dokumen terkait. Selain itu, peneliti juga melakukan pengamatan secara berulang untuk memastikan konsistensi temuan yang diperoleh di lapangan. Dengan pendekatan ini, hasil penelitian diharapkan mampu menggambarkan kondisi aktual pelaksanaan program secara lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bone Bolango mengacu pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional sebagai pedoman utama dalam penyelenggaraan program. Berdasarkan analisis dokumen, petunjuk teknis tersebut mengatur secara komprehensif tahapan pelaksanaan program, mulai dari perencanaan kebutuhan pangan, pengolahan makanan, distribusi kepada penerima manfaat, hingga mekanisme pengawasan dan pengendalian kualitas. Keberadaan petunjuk teknis ini memberikan kerangka kerja yang jelas bagi pelaksana program di tingkat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam menjalankan tugasnya secara terstandar.

Berdasarkan analisis terhadap Petunjuk Teknis Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2026, pengelolaan program MBG dirancang melalui sistem tata kelola yang menekankan pada pengorganisasian yang jelas, pembagian peran pelaksana, serta mekanisme koordinasi dan pengawasan yang terintegrasi. Dalam dokumen tersebut dijelaskan bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) merupakan unit operasional yang bertanggung jawab dalam penyediaan dan distribusi makanan bergizi kepada penerima (Badan Gizi Nasional, 2025).

Di sisi lain, Pedoman Makan Bergizi Gratis (MBG) di Satuan Pendidikan juga mengatur secara rinci tahapan pelaksanaan program, termasuk persiapan sumber daya manusia, prosedur pelaksanaan, serta mekanisme monitoring dan evaluasi sebagai bagian dari pengendalian program (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, 2024). Namun demikian, hasil observasi di lapangan menunjukkan bahwa implementasi petunjuk teknis tersebut belum sepenuhnya berjalan secara konsisten.

Pada aspek pembagian tugas, dokumen teknis telah mengatur struktur peran dan tanggung jawab pelaksana secara sistematis, tetapi dalam praktiknya masih ditemukan tumpang tindih fungsi kerja antar pelaksana. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengorganisasian sumber daya manusia belum berjalan secara optimal, sehingga berpotensi mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program (Hanasi et al., 2026).

Pada aspek koordinasi, petunjuk teknis menekankan pentingnya koordinasi yang terintegrasi antar pelaksana untuk menjamin kelancaran proses operasional. Namun, hasil pengamatan menunjukkan bahwa koordinasi yang terjadi di lapangan masih bersifat informal dan situasional. Mekanisme koordinasi belum didukung oleh sistem yang terstruktur, sehingga dalam beberapa kondisi menyebabkan keterlambatan dalam proses distribusi dan kurang optimalnya pengendalian kegiatan operasional. Temuan ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara standar yang ditetapkan dalam dokumen dengan praktik pelaksanaan di lapangan (Silaban et al., 2026); (Risnawati et al., 2025).

Selanjutnya, pada aspek pengawasan, petunjuk teknis telah mengatur mekanisme pengendalian yang dilakukan secara berjenjang untuk memastikan kualitas layanan tetap terjaga. Namun, hasil observasi menunjukkan bahwa pengawasan belum berjalan secara optimal, terutama dalam memastikan kepatuhan terhadap standar kebersihan, keamanan pangan, dan pengelolaan lingkungan kerja. Masih ditemukan praktik yang belum sesuai dengan ketentuan teknis, seperti pengelolaan limbah dapur yang belum memenuhi standar yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan belum sepenuhnya mampu mengendalikan pelaksanaan program secara efektif (Winny et al., 2025).

Dari sisi kompetensi sumber daya manusia, petunjuk teknis menekankan pentingnya kesiapan pelaksana yang didukung oleh kemampuan teknis dan pemahaman terhadap prosedur operasional. Namun, hasil analisis menunjukkan bahwa pelaksana program di tingkat SPPG umumnya baru memiliki pemahaman dasar terkait pelaksanaan program, sementara keterampilan teknis dalam pengelolaan operasional masih terbatas. Keterbatasan ini berdampak pada pelaksanaan tugas yang belum sepenuhnya sesuai dengan standar yang ditetapkan, terutama dalam menjaga konsistensi kualitas layanan (Ciplis et al., 2021).

Selain itu, analisis terhadap dokumen dan hasil observasi menunjukkan bahwa kesiapan sarana pendukung juga menjadi faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program. Petunjuk teknis telah mengatur standar fasilitas yang harus dipenuhi oleh SPPG, termasuk ruang pengolahan, penyimpanan, dan distribusi makanan. Namun, pada praktiknya masih terdapat keterbatasan fasilitas yang belum sepenuhnya memenuhi standar tersebut. Kondisi ini berdampak pada kelancaran operasional dan berpotensi mempengaruhi kualitas layanan yang diberikan kepada penerima manfaat (Basuki et al., 2026).

Untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis mengenai temuan penelitian, berikut disajikan ringkasan hasil analisis terhadap pengelolaan sumber daya manusia dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis SPPG di Kabupaten Bone Bolango.

Tabel: 1 Ringkasan Temuan Penelitian

Aspek Pengelolaan S	Temuan Lapangan	Kesesuaian dengan Petunjuk Teknis
Pembagian tugas	Masih terjadi tumpang tindih pe antar pelaksana	Belum sesuai dengan pembagian fungsi yang terstruktur
Koordinasi kerja	Koordinasi dilakukan secara informal dan situasional	Belum memenuhi prinsip koordin terintegrasi
Pengawasan	Pengawasan belum berjalan secara konsisten	Belum sesuai dengan mekanisme pengendalian berlapis
Kompetensi SDM	Pelaksana memiliki pemahaman dasar, namun keterampilan teknis terbatas	Belum memenuhi standar kapasitas pelaksana
Sarana pendukung	Fasilitas operasional belum sepenuhnya memadai	Belum sepenuhnya memenuhi standar teknis pelaksanaan

Tabel 1 menunjukkan bahwa sebagian besar aspek pengelolaan sumber daya manusia dalam pelaksanaan program masih belum sepenuhnya selaras dengan ketentuan yang tercantum dalam petunjuk teknis. Ketidaksiesuaian tersebut terutama terlihat pada aspek koordinasi, pengawasan, serta pembagian tugas yang belum berjalan secara optimal.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Program Makan Bergizi Gratis telah memiliki landasan regulatif yang jelas melalui petunjuk teknis, implementasinya di tingkat daerah masih memerlukan penguatan pada aspek pengelolaan sumber daya manusia. Penguatan tersebut mencakup peningkatan kapasitas pelaksana, perbaikan mekanisme koordinasi, serta penguatan fungsi pengawasan agar pelaksanaan program dapat berjalan secara lebih efektif dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

SIMPULAN

Kesimpulan menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya manusia memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan implementasi Program Makan Bergizi Gratis di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Kabupaten Bone Bolango. Meskipun program telah memiliki landasan regulatif yang jelas melalui petunjuk teknis yang disusun oleh Badan Gizi Nasional, pelaksanaannya di lapangan belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya ketidaksiesuaian antara standar yang ditetapkan dengan praktik pelaksanaan, terutama pada aspek pembagian tugas, koordinasi kerja, pengawasan, serta kompetensi pelaksana.

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi program tidak hanya ditentukan oleh keberadaan kebijakan dan pedoman teknis, tetapi juga oleh kemampuan organisasi dalam mengelola sumber daya manusia secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan kapasitas pelaksana, perbaikan sistem koordinasi, serta peningkatan fungsi pengawasan agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih terarah dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji lebih lanjut

aspek kolaborasi antar pemangku kepentingan serta dampak program terhadap penerima manfaat secara lebih luas.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan penelitian ini, khususnya kepada pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Bone Bolango yang telah memberikan akses dan informasi terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan artikel ini hingga selesai.

DAFTAR RUJUKAN

- Badan Gizi Nasional. (2025). *Petunjuk Teknis Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2026*.
- Basit, M., & Ramadani, H. (2025). Analisis Implementasi Program Makan Bergizi Gratis Terhadap Perkembangan Ekonomi. *Journal of Economics Development Research*, 1(2), 49–54. <https://doi.org/10.71094/joeder.v1i2.105>
- Basuki, R. M., Muharrom, N. W., & Kusuma, N. A. (2026). Implementasi Program Makan Bergizi Gratis: Evaluasi Pelaksanaan dan Tantangan Operasional. *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 1413–1423.
- Ciplis, G. Q., Yulia, I., Oktaviani, A. W., Misbahol, Y., Meisyaroh, C. W., & Bayu, W. (2021). Optimalisasi Program Makan Bergizi Gratis di SMK Negeri 1 Jember dalam Rangka Peningkatan SDM Unggul Masa Depan. *Jurnal Pelayanan Masyarakat*, 32(3), 167–186.
- Hanasi, R. A., Akuba, I., Miranti, I., Monoarfa, C., Ahmad, M. R. M., & Pantooyo, A. P. (2026). Implementasi Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis sebagai Pendorong dan Pembangunan Ekonomi Lokal melalui peningkatan permintaan terhadap produk pertanian, penguatan rantai pasok pangan, strategis pemerintah untuk meningkatkan pemenuhan gizi anak seko. *Jurnal Manajemen, Bisnis Dan Kewirausahaan*, 6(November 2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jumbiku.v6i1.6403>
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. (2024). *Pedoman Makan Bergizi Gratis Di Satuan Pendidikan*.
- Lendra, I. W., Daud, H., & Yuyun, F. (2025). Kebijakan Makan Bergizi Gratis dan Relevansinya terhadap Nilai-nilai. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(1).
- Risnawati, E., Suriansyah, A., & Mulya Budi Harsono, A. (2025). Implementasi Program Makan Bergizi Gratis dalam Peningkatan Efektivitas Proses Pembelajaran di Sekolah Dasar. *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 02(04), 832–842.
- Sarjito, A. (2024). Free Nutritious Meal Program as a Human Resource Development Strategy to Support National Defence. *International Journal Administration, Business & Organization*, 5(5), 129–141. <https://doi.org/10.61242/ijabo.24.454>
- Silaban, S. L., Elsi, S. D., & Rizal, D. (2026). Analisis Implementasi Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis di Kota Jambi Menurut Teori Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle. *Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik*,

3(November

2025).

<https://doi.org/https://doi.org/10.62383/demokrasi.v3i1.1547>

Winny, A., Yusnanik, B., Henni, M., & Oktaviani, P. sari. (2025). Implementasi Kebijakan Makan Bergizi Gratis (Studi Pada SMA Negeri 2 Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan). *Jurnal Edu Research*, 6, 424-431.